

SEMINAR NASIONAL KOMUNIKASI
Bandarlampung 2016



**PROSIDING :
AKSELERASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT LOKAL
MELALUI KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

BUKU 2



JURUSAN ILMU KOMUNIKASI - FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG

ISBN : 978-602-60412-0-3

PENGENDALIAN PESAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA BARU MELALUI PENINGKATAN LITERASI MEDIA

Oleh :

Edi Santoso

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsoed,
edisant@gmail.com

ABSTRAK

Pesan kebencian (*hate speech*) mengiringi kebebasan berpendapat di media baru (*New Media*). Dalam konteks Indonesia, fenomena ini menguat terutama saat berlangsungnya hajatan politik seperti pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Sejak pilpres 2014 lalu, istilah 'hater' pun dikenal luas, yang menandai orang-orang dengan kecenderungan membuat pesan-pesan bernada kebencian pada orang atau kelompok tertentu. Khususnya bagi *netizen* (pengguna internet) kalangan muda—yakni generasi Y dan Z, praktik komunikasi dengan pesan-pesan kebencian ini harus mendapat perhatian khusus. Selain karena pewaris bangsa ini, generasi tersebut lah yang kini mewarnai dunia maya. Merekalah warga asli dunia digital (*digital native*). Mereka sadar akan hak untuk berbicara dan berekspresi, tapi seringkali lupa bahwa ranah *online* adalah ranah publik yang melekat di dalamnya tanggung jawab normatif. Tulisan ini mengkaji upaya menghadapi pesan kebencian melalui perspektif teori literasi media. Diasumsikan, melalui peningkatan literasi media, *netizen* akan lebih memiliki konstruksi yang positif dalam memanfaatkan media *online*. Literasi media yang tinggi, akan ditandai oleh: (1) daya kritis dalam menerima dan memaknai pesan, (2) kemampuan untuk mencari dan memverifikasi pesan, (3) kemampuan untuk menganalisis pesan dalam sebuah diskursus, (4) memahami logika penciptaan realitas oleh media, dan (5) kemampuan untuk mengkonstruksi pesan positif dan mendistribusikannya kepada pihak lain.

Kata Kunci: Pesan Kebencian, Media *Online*, Literasi Media

PENDAHULUAN

Kehadiran media baru (*new media*) tak hanya membawa banyak kemudahan, tetapi juga tantangan. Salah satunya, adalah masalah etika yang kian meningkat seiring dengan laju penggunaan media berbasis internet. Pesan kebencian (*hate speech*) misalnya, kini semakin meningkat jumlahnya di ranah *online*. Di Inggris misalnya, jumlah orang yang ditahan karena kejahatan ucapan di internet meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010 tercatat 625 orang ditahan dalam kasus ini, yang meningkat menjadi 857 orang pada tahun 2015. Jadi, ada peningkatan 37 persen dalam rentang lima tahun (seperti dikutip Leam Deacon dari Freedom of Information Request yang dibuat oleh Metropolitan Police). BBC pernah menyebut tahun 2015 sebagai 'The Year that Angry Won The Internet', berdasarkan data yang menunjukkan tingginya pesan kebencian di internet. Sebagai contoh, berdasarkan analisis Demos, rata-rata 480 ribu pesan berisi kebencian ras di tweet-kan melalui Twitter tiap bulan pada tahun 2015. Bandingkan dengan angka 10 ribu pada tiga tahun sebelumnya. Dalam pandangan UN Human Rights Council Special Rapporteur on Minority Issues (HRC, 2015), pesan kebencian di ranah *online* menjadi tantangan baru. Sementara statistik yang memberikan gambaran global tentang fenomena ini belum tersedia, platform jejaring sosial dan organisasi yang diciptakan untuk memerangi kebencian telah menunjukkan bahwa pesan

kebencian yang disebarkan secara *online* semakin umum dan telah menimbulkan perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut HateBase-aplikasi berbasis web yang mengumpulkan contoh pesan kebencian *online* di seluruh dunia, sebagian besar kasus kebencian atas individu terjadi berdasarkan etnis dan kebangsaan. Hasutan untuk kebencian yang berfokus pada agama dan kelas juga telah meningkat.

Di Indonesia sendiri, memang belum ada data kuantitatif yang menunjukkan peningkatan pesan kebencian di ranah *online*. Namun, beberapa peristiwa terakhir menunjukkan dampak mengerikan dari beredarnya pesan kebencian, misalnya dalam kasus kerusuhan Tanjung Balai. Kejadian yang terjadi pada Juli 2016 ini berawal dari kesalahpahaman beberapa orang, yang kemudian diunggah dan disebarluaskan melalui media sosial. Orang yang menerima pesan tanpa memahami persoalan sesungguhnya kemudian tersulut amarah, dan turut menyebarkan pesan itu. Pesan yang sambung menyambung itu kemudian memunculkan kemarahan massa, hingga mengakibatkan kerusakan sebuah tempat ibadah. Sebelum kasus ini, pesan kebencian juga marak terutama pada saat hajatan politik seperti pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Pilpres 2014 tercatat sebagai kontestasi yang menyedot perhatian besar para *netizen*. Dua kelompok pendukung saling berhadapan dan sama-sama 'militan'. Dari sinilah kemudian populer istilah 'hater', karena memang pesan-pesan kebencian diproduksi dan direproduksi secara massal oleh masing-masing kubu untuk menegasikan kelompok lainnya. Suasana ini tak serta merta meredup seiring berlalunya pilpres. Pada saat menjelang pilkada DKI 2017 misalnya, suasana pilpres 2014 kembali terulang. Masing-masing kelompok saling serang dengan pesan-pesan kebencian di ranah *online*.

Melihat maraknya pesan kebencian di Indonesia, Pemerintah melalui kepolisian (Polri) mengeluarkan edaran khusus yang memberi ancaman terhadap pelaku penyebar kebencian. Dalam Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 itu disebutkan bahwa persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pada Nomor 2 huruf (f) SE itu, disebutkan bahwa "ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP.

Aspek regulasi memang diperlukan, tetapi tak akan pernah cukup untuk mengendalikan pesan kebencian. Sanksi hukum lebih berfokus pada wilayah hulu, yakni mereka yang memproduksi pesan kebencian. Dalam logika 'supply and demand', para produsen pesan kebencian itu eksis karena banyak yang menikmatinya. Karena itu, diperlukan langkah lain, yakni upaya kultural untuk memberikan penyadaran pada para pengguna media sosial, baik mereka yang aktif memproduksi pesan atau sekadar mengonsumsi pesan. Langkah penyadaran inilah bagian dari apa yang kita sebut sebagai peningkatan literasi media atau kecerdasan bermedia.

1. Konsep dan Kajian Seputar Pesan Kebencian

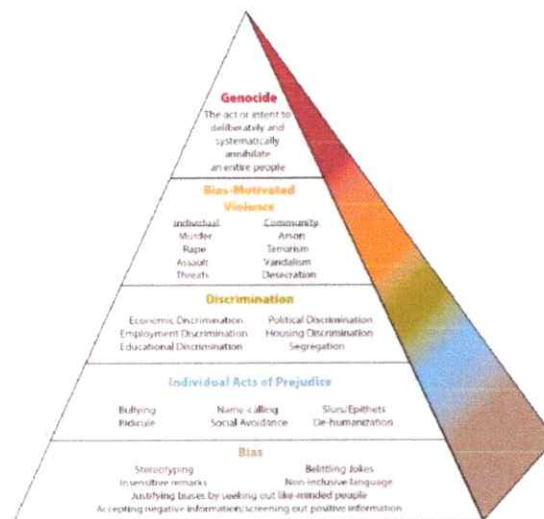
Menurut UNESCO (Gagliardon, 2015), pesan kebencian merujuk pada ekspresi hasutan untuk menyakiti (khususnya diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan) terhadap sasaran kelompok sosial atau demografis tertentu, misalnya perkataan yang membela, mengancam, atau mendorong tindak-tanduk kekerasan. Konsep ini kadang diperluas pada ekspresi yang menumbuhkan iklim prasangka dan intoleransi yang diasumsikan menjadi bahan bakar diskriminasi, permusuhan, dan serangan kekerasan. Dalam bahasa umum, definisi pesan kebencian cenderung meluas, kadang bahkan mencakup kata-kata yang menghina penguasa atau individu. Terutama pada saat-saat krusial, seperti saat pemilu, konsep pesan kebencian mungkin rentan terhadap manipulasi. Tuduhan mengobarkan kebencian mungkin diperdagangkan antara lawan politik atau digunakan oleh mereka yang

berkuasa untuk mengekang perbedaan pendapat dan kritik. Sementara itu, menurut Council of Europe (Weber, 2009), pesan kebencian meliputi segala bentuk ekspresi yang disebarkan untuk menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian ras, xenophobia, anti semisme, atau bentuk kebencian lain yang berakar pada intoleransi, termasuk intoleransi yang diekspresikan nasionalisme dan etnosentrisme agresif, diskriminasi dan permusuhan terhadap minoritas dan warga pendatang.

Alois A. Nugroho (2016) mengutip Rita Kirk Whillock dalam esainya yang berjudul "Ethical Considerations of Civil Discourse: The Implication of The Rise of Hate Speech" (dalam Denton, ed., 2000) menyebut bahwa pesan kebencian pada hakikatnya adalah "anihilis retorik" terhadap lawan. Meskipun hanya melalui kata-kata, pesan kebencian itu bertujuan untuk meniadakan atau mematikan lawan. Akibatnya, dialog atau diskursus menjadi macet. Tak ada kesediaan untuk menghargai dan mendengarkan lawan bicara. Tak ada kesediaan untuk terbuka, untuk belajar, dan berubah.

Dari penelitiannya, Bartlett (2015) menyebut pesan kebencian sebagai potret gelap internet, di luar masalah pornografi anak, perdagangan obat terlarang, provokasi, dan pasar asasinasi. Internet sendiri, menurut Bartlett (2015), sudah menjadi platform politik yang penting di berbagai belahan dunia, mulai dari kampanye Barack Obama di Amerika Serikat hingga flash mob gerakan pendudukan. Akan tetapi, teknik yang sama juga digunakan gerakan-gerakan politik ekstrem untuk menyebarkan pesan kebencian dan merekrut pendukung baru.

Untuk memahami kontekstualisasi tindakan diskriminatif, termasuk pesan kebencian, dan kemungkinan konsekuensinya, Liga Antifitnah (The Anti-Defamation League) mengembangkan piramida sebagai berikut:



Gambar 1. Piramida Kebencian

Piramid tersebut menunjukkan perilaku bias, yang muncul secara kompleks dari bawah ke atas. Dimulai dari hal yang nampak lumrah, seperti *stereotyping* atau informasi

negatif, kebencian bisa terus meningkat eskalasinya, hingga di level puncak yang paling mengerikan, yakni genosida.

Pesan kebencian di ranah *online* memang tidak memiliki perbedaan esensial dengan pesan serupa di ranah *offline*, namun ada beberapa karakteristik (Gagliardon, 2015) yang harus menjadi perhatian kita. *Pertama*, kekekalan pesan (*permanence*). Di ranah *online*, pesan bisa bertahan dalam waktu yang lama, dan dalam format yang berbeda bisa lintas platform dan dapat diulang melalui tautan (*link*). Arsitektur platform akan berpengaruh pada berapa lama pesan bertahan. Pada Twitter misalnya, ada 'trending topic' yang menggambarkan bagaimana pesan cepat tersebar, menjadi pembicaraan global, namun tak lama usianya. Sedangkan pada Facebook, ada peluang pesan akan bertahan lebih lama.

Kedua, pengembaraan pesan (*itinerancy*). Bahkan ketika pesan sudah dihapus, di ranah *online*, bisa dibangkitkan lagi dalam platform yang sama dengan nama yang berbeda atau dimunculkan dalam ruang *online* yang berbeda. *Ketiga*, anonimitas atau kepalsuan (*false name*). Dalam kondisi anonim, orang akan merasa lebih nyaman dan aman untuk menyebarkan pesan kebencian. Dengan menggunakan identitas palsu misalnya, orang akan merasa aman dari penuntutan. *Keempat*, transnasionalitas (*transnationality*). Pesan yang menyebar lintas negara akan memunculkan persoalan tersendiri, misalnya terkait mekanisme hukum untuk mengatasinya.

Meskipun pesan kebencian di ranah *online* memiliki karakteristik yang unik, bukan berarti kita bisa membangun asumsi bahwa apa yang terjadi di ranah *online* terpisah dari apa yang terjadi di ranah *offline* (*digital dualist assumption*). Jurgensen (2011) mengatakan, media sosial memiliki banyak hal yang bisa dilakukan dengan dunia fisik. Dunia *offline* kita juga terus dipengaruhi oleh media sosial. Keluar dari asumsi *dualist* ini berarti kita harus memberi penekanan pada konteks munculnya pesan kebencian di ranah *online*: bahwa pesan kebencian di internet adalah ekspresi dari fenomena yang lebih luas, dari rasisme yang meluas dan terus meningkat.

Beberapa studi telah dilakukan untuk mengamati penyebaran pesan kebencian di dunia *online*. Misalnya, penelitian oleh MRAP—sebuah organisasi dari Perancis, yang pada 2008-2009 menganalisis lebih dari 2000 URL, tidak hanya situs kebencian itu sendiri, tetapi juga *link* ke dan dari situs ini yang mengarah ke forum, blog, situs jejaring sosial dan video. Riset ini menggambarkan jaringan kebencian. Sebuah kecanggihan dari banyak kelompok kebencian dalam menyebarkan ideologi mereka. Ditampilkannya satu video, misalnya, mengarahkan pengguna pada video dan musik kebencian lainnya, komunitas yang berbagi pandangan sama, dan sumber daya lainnya (CoE, 2012).

Rogers (2013) yang memfokuskan pada gerakan ekstrim kanan melakukan pemetaan *online* sayap kanan ekstrim dan populis di 13 negara Eropa. Rogers menyebutnya sebagai "a picture of the right according to the web". Pemetaan ini menemukan adanya perpindahan gerakan sayap kanan dari web menuju media sosial. Penulis menunjukkan bahwa tidak hanya organisasi pemuda dan pemuda yang telah meninggalkan web dan sekarang menggunakan media sosial, tetapi juga 'kanan baru', sehingga semakin baru pembentukan sayap kanan, semakin *update* media yang mereka gunakan. Rogers pun mendorong penelitian baru untuk fokus pada jaringan media sosial dan daya tarik konten dan kegiatan untuk pengikut hak ini, mempelajari keterlibatan mereka dalam hal seperti, saham, komentar pada pengikut kelompok ini.

Studi lain, yang dilakukan di Inggris, telah difokuskan pada pelaku Islamophobia di Twitter, menyusul serangan Woolwich Mei 2013 (Awan, 2013). Studi ini meneliti 500 tweets dari 100 pengguna Twitter, melihat hashtag #Woolwich, #Muslim dan #Islam, untuk menganalisis bagaimana Muslim dipandang oleh pelaku pelecehan *online*, yang bertujuan untuk memberikan tipologi karakteristik pelaku. Mayoritas (72%) dari tweets yang dianalisis

dibuat oleh laki-laki yang tinggal di Inggris, dan lebih dari 75% dari tweets menunjukkan sentimen Islamophobia yang kuat.

2. Literasi Media sebagai Solusi

Literasi Media (Media literacy) di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Melek Media. James Potter (2001: 5) dalam bukunya yang berjudul "*Media literacy*" mengatakan bahwa *media literacy* adalah sebuah perspektif yang digunakan secara aktif, ketika individu mengakses media dengan tujuan untuk memaknai pesan yang disampaikan oleh media. *Media literacy* terkait dengan pemahaman akan dampak komunikasi, mulai dari iklan, ide-ide, hingga teknologi (Folkert & Lacy, 2004: 8). Allan Rubin (dalam Baran & Davis, 2003:375) menawarkan tiga definisi mengenai *media literacy*: Pertama, dari *National Leadership Conference on Media literacy* yaitu kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan. Kedua, dari ahli media, Paul Messaris, yaitu pengetahuan tentang bagaimana fungsi media dalam masyarakat. Ketiga, dari peneliti komunikasi massa, Justin Lewis dan Shut Jally, yaitu pemahaman akan batasan-batasan budaya, ekonomi, politik dan teknologi terhadap kreasi, produksi dan transmisi pesan. Rubin juga menambahkan bahwa definisi-definisi tersebut menekankan pada pengetahuan spesifik, kesadaran dan rasionalitas, yaitu proses kognitif terhadap informasi. Fokus utamanya adalah evaluasi kritis terhadap pesan. Media literasi merupakan sebuah pemahaman akan sumber-sumber dan teknologi komunikasi, kode-kode yang digunakan, pesan-pesan yang dihasilkan serta seleksi, interpretasi dan dampak dari pesan-pesan tersebut.

Menurut berbagai peneliti (Allington, Forbes, Quinlisk, Scheibe, dan Valmont, dalam Lacina: 2005), *media literacy* sejatinya adalah bentuk pembelajaran untuk membaca, sejak siswa belajar membaca, baik secara tekstual maupun visual. Karena adanya jarak antara pesan dan gambar di media, siswa belajar untuk menginterpretasi berbagai bentuk komunikasi. Media mengkomunikasikan informasi linguistik, menggambarkan berbagai struktur gramatikal, dan pada saat yang bersamaan media juga mengkomunikasikan pesan tersamar mengenai masyarakat dan aturan partisipasi.

Silverblatt (dalam Potter, 2001: 72) menyatakan bahwa *media literacy* memiliki lima elemen yaitu: (1) Sebuah kesadaran akan dampak media terhadap individu dan masyarakat, (2) Sebuah pemahaman akan proses komunikasi massa, (3) Pengembangan strategi-strategi yang digunakan untuk menganalisis dan membahas pesan-pesan media, (4) Sebuah kesadaran akan isi media sebagai 'teks' yang memberikan wawasan dan pengetahuan ke dalam budaya kontemporer manusia dan diri manusia sendiri, (5) Peningkatan kesenangan, pemahaman dan apresiasi terhadap isi media.

Di sisi lain, Potter (Baran 2004:51) memberikan pendekatan yang agak berbeda dalam menjelaskan ide-ide mendasar dari *media literacy*, yaitu: (1) Sebuah rangkaian kesatuan, yang bukan merupakan kondisi kategorikal, (2) *Media literacy* perlu dikembangkan dengan melihat tingkat kedewasaan seseorang, (3) *Media literacy* bersifat multidimensi, yaitu domain kognitif yang mengacu pada proses mental dan proses berpikir, domain emosi yaitu dimensi perasaan, domain estetis yang mengacu pada kemampuan untuk menikmati, memahami dan mengapresiasi isi media dari sudut pandang artistik, dan domain moral yang mengacu pada kemampuan untuk menangkap nilai-nilai yang mendasari sebuah pesan, (4) Tujuan dari *media literacy* adalah untuk memberi kita kontrol yang lebih untuk menginterpretasi pesan.

Jadi, literasi media berfokus pada individu sebagai pihak yang memproduksi, mereproduksi, atau mengonsumsi pesan. Dalam konteks media *online*, penekanan pada individu ini menjadi lebih strategis, karena pelaku komunikasi utama pada ranah *online* adalah individu (*netizen*). Seperti pada media sosial, kunci wacana ada pada para pemilik akun media sosial. UNESCO (Gagliardon, 2015) sendiri menjadikan pendekatan literasi

media sebagai salah satu upaya melawan pesan kebencian, melalui pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*) dan kewarganegaraan digital (*digital citizenship*). Pendidikan kewarganegaraan berfokus pada upaya mempersiapkan individu yang melek informasi dan warga yang bertanggung jawab, melalui studi hak, kebebasan, dan tanggung jawab. Upaya ini telah banyak digunakan dalam masyarakat yang rawan konflik kekerasan (Osler dan Starksey, 2005). Salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran tentang hak-hak politik, sosial dan budaya individu dan kelompok, termasuk kebebasan berbicara dan tanggung jawab dan implikasi sosial yang muncul. Dalam beberapa kasus, argumentasi yang efektif dan keterampilan yang diperlukan untuk mengartikulasikan keyakinan dan pendapat pribadi secara bermartabat telah dimasukkan sebagai salah satu hasil belajar pada program pendidikan kewarganegaraan.

Perhatian pendidikan kewarganegaraan terkait pesan kebencian meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi pesan kebencian, sehingga memungkinkan individu untuk menangkal pesan kebencian. Salah satu tantangan saat ini adalah mengadaptasi tujuan dan strategi ini ke dunia digital, tidak hanya menyediakan argumen, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan teknologis bahwa warga negara mungkin perlu untuk menetralkan kebencian *online*. Sebuah konsep baru kewarganegaraan digital sedang diusulkan oleh beberapa organisasi yang menggabungkan tujuan inti dari literasi media dan informasi, bertujuan untuk mengembangkan ketrampilan teknis dan kritis bagi konsumen dan produsen media, dan yang menghubungkan mereka dengan etika dan hak sipil.

Secara operasional, aspek literasi media ini harus bisa memunculkan kesadaran tentang posisi dan peran media baru (*new media*) dalam kehidupan berbangsa. Warga harus sadar bahwa media ibarat pisau bermata dua, bisa untuk membangun masyarakat atau merusak masyarakat dengan dampak-dampak yang diakibatkannya. Warga harus sadar bahwa mereka berada di ruang publik ketika berselancar di dunia *online*, sehingga segala tindakannya tidak bebas nilai. Lebih dari itu, warga juga harus sadar dengan peran strategisnya. Setiap orang kini adalah wartawan (*citizen journalist*) ketika mereka terlibat dalam aksi mencari, menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi. Sebagai wartawan, perhatian pada etika adalah mutlak. Dari sisi kompetensi, literasi media dalam pendidikan kewarganegaraan harus mampu melahirkan: (1) daya kritis dalam menerima dan memaknai pesan, (2) kemampuan untuk mencari dan memverifikasi pesan, (3) kemampuan untuk menganalisis pesan dalam sebuah diskursus, (4) memahami logika penciptaan realitas oleh media, dan (5) kemampuan untuk mengkonstruksi pesan positif dan mendistribusikannya kepada pihak lain.

Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan telah menjadi bagian dari kurikulum, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, namun belum memasukkan aspek literasi media. Dengan melihat dampak dari minusnya pemahaman media, sehingga meningkatnya pesan kebencian di media *online*, pemerintah nampaknya perlu melakukan revisi isi pendidikan kewarganegaraan dengan memasukkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pesan kebencian pada media. Target pendidikan ini terutama diarahkan ke kalangan muda, dengan beberapa pertimbangan. Pertama, secara umum, usia muda adalah fase rawan, di mana mereka belum memiliki konsp diri yang kokoh. Jiwa muda diwakili oleh semangat yang menggebu dan kecederungan cepat bereaksi pada stimulus dari luar. Kedua, kalangan muda inilah pengguna media baru terbesar. Mereka ini adalah penduduk asli dunia digital (*native digital*) yang akan mewarnai hiruk pikuk dalam dunia *online*.

PENUTUP

Pesan kebencian kian meningkat jumlahnya di ranah *online*. Bagi Indonesia yang plural masyarakatnya (*multiras, multi-etnis, multiagama*), dampak pesan kebencian sungguh mengkhawatirkan. Semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' bisa goyah, kalau kita abai pada pesan-

pesan kebencian (misalnya kental nuansa SARA) di ranah *online*. Kasus-kasus yang sudah terjadi sebagai akibat menyebarnya pesan kebencian cukuplah menjadi pelajaran berharga. Selain pendekatan struktural melalui regulasi, upaya kultural melalui peningkatan literasi media relevan untuk dilakukan. Literasi media ini berfokus pada keberdayaan *netizen* dalam merespon pesan-pesan kebencian di ranah *online*. *Netizen* yang literasi medianya tinggi, tak hanya sadar pada etika tetapi juga memiliki keterampilan konstruktif dalam menerima, memproduksi dan mereproduksi pesan.

DAFTAR REFERENSI

- Awan, I. 2013. *Victims of Anti-Muslims Hate*. Diakses tgl 06/06/2015, di <http://tellmamauk.org/wp-content/uploads/2013/09/appg.pdf>
- Barran, Stanley & Davis, Dennis. 2003. *Mass Communication Theory: Foundation, Ferment, and Future*. Belmont, CA : Wadsworth
- Bartlett, Jamie. 2015. *The Dark Net: Inside the Digital Underworld*. New York: Melville House Publishi
- Deacon, Liam. 2015. Massive Increase In Arrests For 'Hate Speech' On Social Media, diakses pada 6/11/2016 di <http://www.breitbart.com/london/2016/06/04/massive-increase-in-arrests-for-hate-speech-on-social-media/>
- Folkert, Jean & Lacy, Stephen. 2004. *The Media in Your Life: An Introduction to Mass Communication*. New York: Pearson
- Gagliardon, et.al. 2015. *Countering Online Hate Speech*. Paris: UNESCO Publishing
- Lacina, Jan. 2005. Media Literacy and Learning. *Childhood Education*. Vol.: 82. Issue: 2.
- Nugoho, Alois A. 2016. *Komunikasi dan Demokrasi: Esai-esai Etika Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Kanisius
- Osler, A. and Starkey, H. 2005. *Changing Citizenship*. Berkshire: Open University Press.
- Potter, James. 2001. *Media Litaracy*. London: Sage Publication
- Rogers, Richard. 2013. *Right-wing Formations in Europe and Their Counter-Measures: An Online Mapping*. Amsterdam: Digital Media Initiative
- Weber, Ane. 2009. *Manual on Hate Speech*. Strasbourg: Council of Europe Publishing
- Wendling, Mike. 2015. *2015: The year that angry won the internet*. diakses pada 5/11/2016 di <http://www.bbc.com/news/blogs-trending-35111707> .
- <http://news.okezone.com/read/2016/07/30/340/1450999/postingan-di-media-sosial-penyebab-kerusuhan-tanjung-balai>



JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No 1, Bandar Lampung
email : ilmu.komunikasi@fsip.unila.ac.id



Sertifikat

diberikan kepada:
Edi Santoso

sebagai : Pemakalah

Pada kegiatan :

SEMINAR NASIONAL KOMUNIKASI
AKSELERASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT LOKAL
MELALUI KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

The 7th Hotel Bandar Lampung, 17 November 2016

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Dhanis

Dhanik Sulistyari, S.Sos., MComm&MediaSt
NIP. 19760422 200012 200 1

Ketua Pelaksana
Seminar Nasional Komunikasi 2016

[Signature]

Dr. Nina Yudhi Aryanti, M.Si.
NIP. 19750522 200312 200 2

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung
[Signature]
NIP. 19560803 198603 100 3

supported by :



BANK LAMPUNG



media partners :

